



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NASRUDDIN DJOKO SURJONO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 74422

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.207.441.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 323.131.000
2. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 26.400.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 255.781.000
4. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 352.129.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 618.090.000

1. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.090.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 151.160.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.241.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 1.998.932.000

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 1.998.932.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.